

Analisis Informasi Publik di Kepolisian Sektor Pademangan

Gracia Irena Saputri

Universitas Negeri Jakarta

gracia0731@email.com

Christian Wiradendi Wolor

Universitas Negeri Jakarta

christianwiradendi@unj.ac.id

Marsofiyati

Universitas Negeri Jakarta

marsofiyati@unj.ac.id

Alamat: Jl. R.Mangun Muka Raya No.11, RT.11/RW.14, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung,
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220;Telepon: (021) 4898486

Korespondensi penulis: gracia0731@email.com

Abstract. *This research discusses public information in the Pademangan Sector Police. Public information is an important part of public administration. Public information is all information that is publicly available and can be accessed by the public freely. This information may include government data, public reports, legal documents, or other relevant content. The importance of public information in society is to encourage transparency, accountability and citizen participation in the democratization process. However, effective management and access to public information also raises issues related to privacy, security and ethics. The use of public information is also to provide open and transparent access to information produced or managed by the government or public institutions to the general public. This aims to enable the public to understand, monitor and participate in government and decision-making processes. Public information enables the public to have sufficient knowledge to evaluate government performance, understand public policy, and play an active role in community development and maintaining government accountability. Therefore, it is important for the government and other agencies, including the police, that provide public information to consider the interests of the community and maintain the basic principles of fair and just public information.*

Keywords: *Information, Government, Police, Public*

Abstrak. Penelitian ini membahas mengenai informasi publik di Kepolisian Sektor Pademangan. Informasi publik merupakan salah satu bagian penting dari penyelenggaraan publik. Informasi publik adalah segala informasi yang tersedia untuk umum dan dapat diakses oleh masyarakat secara bebas. Informasi ini dapat berupa data pemerintah, laporan publik, dokumen hukum, atau konten lain yang relevan. Pentingnya informasi publik dalam masyarakat adalah untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga dalam proses demokratisasi. Namun, pengelolaan dan akses yang efektif terhadap informasi publik juga memunculkan isu-isu terkait privasi, keamanan, dan etika. Guna informasi publik juga untuk memberikan akses terbuka dan transparan kepada informasi yang dihasilkan atau dikelola oleh pemerintah atau instansi publik kepada masyarakat umum. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami, mengawasi, dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pengambilan keputusan. Informasi publik memungkinkan masyarakat untuk memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengevaluasi kinerja pemerintah, memahami kebijakan publik, dan berperan aktif dalam pembangunan masyarakat serta menjaga akuntabilitas pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan instansi lain, termasuk kepolisian yang menyediakan informasi publik untuk mempertimbangkan kepentingan masyarakat serta menjaga prinsip-prinsip dasar informasi publik yang adil dan adil.

Kata kunci: Informasi, Kepolisian, Pemerintah, Publik

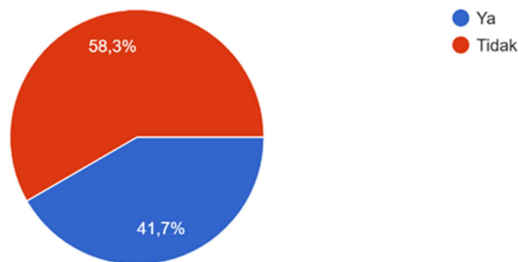
LATAR BELAKANG

Informasi publik adalah aspek demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan hak asasi manusia dalam memperoleh informasi yang benar. Menurut Alfurkon Setiawan, kepala Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Kabinet RI, humas pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan pengelolaan informasi di setiap instansinya, serta mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam mensukseskan berbagai program pemerintah yang hasilnya dapat dinikmati oleh publik. (Afnan, 2019)

Prinsip-prinsip good governance tidaklah akan terwujud tanpa kepedulian pemerintah daerah untuk menyadari bahwa selama ini pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah kepada warga masyarakatnya, UU Keterbukaan Informasi Publik telah dibuat pemerinah dan pemerintah daerah telah membuat perangkat peraturan pemerintah daerah tentang keterbukaan informasi publik. (Agus Setiaman et al., n.d.)

Dalam hal ini, peneliti juga telah melakukan riset melalui pra-riset dengan menyebarkan kuesioner mengenai penyampaian informasi publik kepada personel yang ada di Kepolisian Sektor Pademangan. Hasil dari kuesioner tersebut telah peneliti sajikan dalam bentuk diagram

Apakah informasi publik di Kepolisian Sektor Pademangan sudah efektif?
24 jawaban

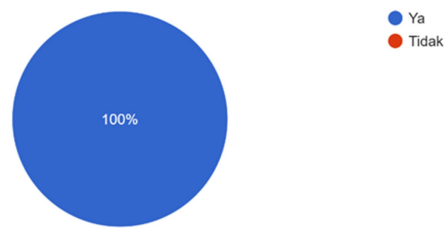


Gambar 1 Keefektifan Informasi Publik

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Berdasarkan diagram di atas dapat dilihat bahwa sebesar 16,7% setuju, Sebesar 3,8% Netral dan 41,7% personel yang bekerja di Kepolisian Sektor Pademangan tidak setuju dan sebesar 37,5% merasa sangat tidak setuju, bahwa pengimplementasian strategi hubungan masyarakat di Kepolisian Sektor Pademangan.

Apakah terdapat faktor-faktor yang bisa mempengaruhi informasi publik di Kepolisian Sektor Pademangan?
24 jawaban



Gambar 2 Faktor Mempengaruhi Informasi Publik

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Berdasarkan gambar diagram di atas dapat disimpulkan bahwa sebesar 100% personel yang bekerja di Kepolisian Sektor Pademangan setuju bahwa terdapatnya faktor-faktor yang mempengaruhi informasi publik dalam Kepolisian Sektor Pademangan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis perlu meneliti lebih dalam mengenai informasi publik di Kepolisian Sektor Pademangan dengan judul: “**Analisis Informasi Publik di Kepolisian Sektor Pademangan**”.

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Informasi Publik

Informasi publik diutarakan oleh beberapa ahli yaitu menurut Suryanto (2000) dalam jurnal Ade Suhendar, informasi publik mengandung pengertian data berupa catatan historis yang dicatat dan diarsipkan tanpa maksud dan segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan atau data yang telah diletakkan dalam konteks yang lebih berarti dan berguna yang dikomunikasikan kepada penerima untuk digunakan didalam pembuatan keputusan.

Dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, keterbukaan informasi memainkan peran utama dan sangat penting untuk mencapai penyelenggaraan pelayanan publik yang unggul dan efektif. Hak atas keterbukaan informasi yang dijamin oleh Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan lebih lanjut diatur oleh Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008 menjadi dasar yang memperkuat kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsinya dengan memberikan pelayanan publik yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Implementasi prinsip

keterbukaan informasi dalam pelayanan publik diharapkan dapat menciptakan good governance (Ahmadi et al., 2019; Susila Wibawa, 2019). (Chairunnisa et al., n.d.)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa informasi publik adalah data-data yang telah dicatat, diolah oleh suatu badan publik. Informasi publik adalah hak bagi publik dan harus bersifat transparan. Informasi publik berisi hal-hal yang berguna dan harus dikomunikasikan ke publik

B. Tujuan Informasi Publik

Tujuan diundangkannya Keterbukaan Informasi Publik adalah meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dilingkungan badan publik, mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah dan wajar serta mengembangkan sistem dokumentasi yang baik untuk penyediaan dan penyimpanan informasi publik secara efektif dan efisien. Disamping itu tujuannya sesuai undangundang adalah (Dedew, 2018) :

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan keputusan publik.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dan observasi yang melibatkan beberapa partisipan. Pengertian penelitian kualitatif menurut Saryono (2010), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data ke peneliti (Sugiyono, 2016.), Sedangkan data sekunder diperoleh secara eksternal melalui referensi dari artikel, jurnal, dan buku (Siregar et al., 2022). Menurut Sugiyono, (2017) sampel ialah bagian dari

populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, dimana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik sampling menurut Sugiyono, (2016) ialah teknik pengambilan sampel, untuk menentukan sampel yang akan digunakan.

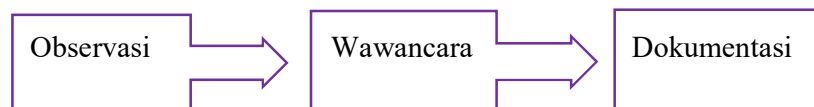
Berdasarkan teori tersebut, peneliti mengambil sebanyak 4 sampel yang berhubungan dengan topik penelitian. Keempat sample tersebut memberikan peneliti berbagai informasi atau aspek penting yang meningkatkan atau memperkaya pemahaman terhadap perspektif yang sedang diteliti. Teori lain yang menjadi dasar pemilihan 4 sampel dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Qualitative Sample Size
Rules of thumb for Qualitative sample size

Pendekatan studi	Rule of Thumb
Studi kasus/biografi	Satu kasus atau satu orang
Fenomenologi	Rekrut 10 orang, jika saturasi diperoleh sebelum itu, anda bisa mewawancarai kurang dari 10
Grounded teori/etnografi/action research	Rekrut 20-30 orang, umumnya ini bisa mencapai saturasi.

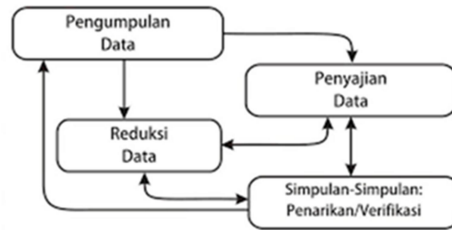
Sumber: (Pande Januraga, 2021)

Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu di luar data dan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Menurut Sugiyono (2015) triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada.



Gambar 3: Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

Sumber: Data diolah oleh peneliti



Gambar 1: Teknik Analisis Data

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa proses penelitian ini dilakukan secara berulang terus-menerus dan saling berkaitan satu sama lain baik dari sebelum, saat di lapangan hingga selesainya penelitian. Komponen alur diatas menjelaskan tahapan-tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui penerapan informasi publik di Kepolisian Sektor Pademangan. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai informasi publik di Kepolisian Sektor Pademangan, dengan itu peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada personel yang terkait dengan topik yang sedang diteliti dan juga peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan. Dalam penelitian ini sebagai informan adalah personel Bhabinkamtibmas, personel Sabhara dan personel Humas dari Kepolisian Sektor Pademangan.

No.	Nama (Inisial)	Usia	Jenis Kelamin	Divisi	Lama Bekerja
1.	Bapak Ru	35 tahun	Laki-laki	<i>Humas</i>	15 Tahun
2.	Bapak Ap	46 tahun	Laki-laki	<i>Sabhara</i>	26 Tahun
3.	Bapak Li	40 tahun	Laki-laki	<i>Bhabinkamtibmas</i>	20 Tahun
4.	Ibu De	35 tahun	Perempuan	<i>Humas</i>	15 Tahun

Tabel 4. 1 Data Partisipan

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Informasi Publik di Kepolisian Sektor Pademangan

Informasi publik adalah salah satu kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan akses dan informasi terbuka kepada publik. , Salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan sebuah negara yang juga hak publik dari badan pemerintahan. Terbukanya informasi dari pemerintahan kepada publik merupakan salah satu ciri negara yang baik, dan terbukanya informasi publik dapat mengoptimalkan hubungan antara pemerintahan dengan publik dengan mengembangkan pengawasan publik.

Menurut Suryanto, informasi publik mengandung pengertian data berupa catatan historis yang dicatat dan diarsipkan tanpa maksud dan segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan atau data yang telah diletakkan dalam konteks yang lebih berarti dan berguna yang dikomunikasikan kepada penerima untuk digunakan didalam pembuatan keputusan. (Sanu Ji, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara, partisipan mengatakan bahwa “Informasi publik di Kepolisian Sektor Pademangan sudah cukup diterapkan dengan optimal, namun kita tidak bisa pungkiri bahwa ada beberapa faktor penghambat, seperti beragamnya reaksi publik saat menerima informasi.”

Hasil data yang diperoleh oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa informasi publik sudah dioptimalkan, namun masih ada beberapa kendala. Seperti beragamnya respon/cara masyarakat menerima informasi. Personel yang berhadapan langsung dengan masyarakat harus bisa mengenali dan menangani berbagai respon masyarakat.

Upaya efektif yang dilakukan untuk mengoptimalkan informasi publik

Upaya efektif merujuk pada tindakan atau langkah-langkah yang diambil dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan secara efisien dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Dalam berbagai konteks, upaya efektif dapat mengacu pada berbagai hal, termasuk manajemen bisnis, pencapaian tujuan pribadi, pengelolaan proyek, atau pemecahan masalah.

Berdasarkan hasil wawancara, partisipan mengatakan bahwa “Upaya yang paling efektif adalah dibentuknya tim-tim yang langsung berhadapan dengan publik, salah satu contohnya adalah Bhabinkamtibmas atau singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.”

Hasil data yang diperoleh oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa upaya efektif untuk mengoptimalkan informasi publik sudah diupayakan secara semaksimal mungkin. Kepolisian membuat tim-tim yang langsung berhadapan dengan masyarakat agar memudahkan penyuluhan dan komunikasi antara kepolisian dengan masyarakat sekitar.

Faktor-faktor yang mempengaruhi informasi publik

Faktor yang mempengaruhi adalah elemen-elemen atau variabel-variabel yang memiliki dampak atau pengaruh pada suatu peristiwa, situasi, atau keputusan. Faktor-faktor bisa beragam tergantung pada konteksnya, dan dapat menyebabkan perubahan atau variasi dalam suatu proses atau hasil.

Berdasarkan hasil wawancara, partisipan mengatakan bahwa “Faktor penghambat yang saya ketahui adalah macam-macam cara masyarakat menerima informasi yang diberikan oleh personel-personel, untuk faktor pendukungnya, seiring waktu masyarakat belajar pentingnya informasi publik bagi masyarakat itu sendiri.”

Hasil data yang diperoleh oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa ada 2 macam faktor . Yang pertama, faktor pendukungnya adalah mulainya keterbukaan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya informasi publik. Kedua, faktor penghambatnya adalah beragamnya cara masyarakat menerima dan merespon penyuluhan juga informasi dari kepolisian. Para personel polisi harus belajar bagaimana cara memahami dan menangani masyarakat yang beragam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasar pada hasil penelitian yang telah dilakukan informasi publik di Kepolisian Sektor Pademangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Informasi publik di Kepolisian Sektor Pademangan sudah tergolong cukup baik walau tidak dapat dipungkiri, masih terdapat faktor penghambat optimalnya informasi publik. Kepolisian Sektor Pademangan menggunakan cara seperti melakukan penyuluhan langsung ke masyarakat sekitar dan melalui web online agar dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Upaya efektif yang dilakukan oleh Informasi publik di Kepolisian Sektor Pademangan

diupayakan oleh seluruh personel dengan optimal. Kepolisian melakukan upaya dengan membuat tim yang langsung berhadapan dengan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi informasi publik di Kepolisian Sektor Pademangan bisa dibagi menjadi 2 macam. Faktor pendukungnya adalah masyarakat sekitar sudah mulai terbuka dan peduli terhadap informasi publik. Dan faktor penghambat, yaitu beragamnya respon masyarakat sehingga personel polisi harus bisa menyesuaikan cara berkomunikasi agar bisa diterima oleh masyarakat. Jujur berdasarkan fakta hasil penelitian yang ada, serta penuh kehati-hatian apabila terdapat upaya generalisasi. Bagian kesimpulan dan saran ini ditulis dalam bentuk paragraf, tidak menggunakan penomoran atau *bullet*. Pada bagian ini juga dimungkinkan apabila penulis ingin memberikan saran atau rekomendasi tindakan berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Demikian pula, penulis juga sangat disarankan untuk memberikan ulasan terkait keterbatasan penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian yang akan datang.

Saran

Berdasarkan pada penelitian yang telah dibuat, maka peneliti memiliki beberapa saran bagi penelitian selanjutnya yaitu:

Penelitian selanjutnya dapat menambah waktu dalam melakukan penelitian dan menyusun penelitian, penelitian ini menggunakan data yang didapat dari partisipan dan menggunakan metode kualitatif dengan satu variabel sehingga penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mendapatkan data melalui metode yang lebih beragam yaitu metode kualitatif dua variabel atau metode kuantitatif.

DAFTAR REFERENSI

- Afnan, D. (2019a). Fungsi Humas Desa Sebagai Pengelola Informasi di Era Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Soshum Insentif*, 153–163. <https://doi.org/10.36787/jsi.v2i2.135>
- Afnan, D. (2019b). Fungsi Humas Desa Sebagai Pengelola Informasi di Era Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Soshum Insentif*, 153–163. <https://doi.org/10.36787/jsi.v2i2.135>
- Agus Setiawan, Dadang Sugiana, & Jimi Narotama M. (n.d.). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik.
- Chairunnisa, L. L., Habibi, F., Berthanila, R., Indonesia, B., Habibi2, F., & Berthanila3, R. (n.d.). Analisis Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Serang.
<https://doi.org/10.47828/jianaasian.v1i1i.158>

Sanu Ji. (2022). BAB II TINJAUAN PUSTAKA.